

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Oktorina Susanti & A'an Effendi. 2015. *Penelitian Hukum : Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deddy S.B. & Dadang Solihin , 2004, Otonomi Penyelenggaraan Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- HAW. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 125.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance: telaah dari dimnsi akuntabilitas dan kontrol biokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- M.Mas'ud Said. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium Pembaruan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Otong Rosadi. 2012. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila; dialektika dan keadilan sosial*. Jakarta: Thafa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jakarta: PT Raja Grasindo

Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Cetakan ke III*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010).

ARTIKEL

EgiFitrah, izin pertambangan, https://www.academia.edu/19825072/izin_pertambangan.

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang mineral batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara